



Perbandingan Kualitas Demokrasi Indonesia dan Jepang: Stabilitas Politik dan Tata Kelola

Muhammad Zaki Maulana

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email : muhamadzakimaulana89@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk membandingkan kualitas demokrasi di Indonesia dan Jepang, dengan fokus pada peran stabilitas politik dan administrasi pemerintahan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka dari berbagai sumber akademis dan laporan dari organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kualitas demokrasi antara kedua negara bukan karena satu negara memiliki institusi demokrasi dan negara lain tidak, melainkan karena institusi di masing-masing negara memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola kekuasaan. Indonesia memiliki partisipasi politik yang tinggi dan pemilihan yang kompetitif, tetapi belum mampu menciptakan stabilitas politik dan tata kelola yang efektif, sehingga demokrasi cenderung lebih berfokus pada mengikuti prosedur daripada perubahan nyata. Di sisi lain, Jepang menunjukkan tingkat stabilitas politik yang tinggi, didukung oleh institusi yang kuat, supremasi hukum yang konsisten, dan manajemen pemerintahan yang efektif, yang mengarah pada demokrasi yang lebih bermakna. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lebih bergantung pada seberapa baik pemerintah bekerja dan kekuatan Kualitas demokrasi di Indonesia lebih bergantung pada institusi-institusinya daripada seberapa kompetitifnya kancah politik.

Kata kunci: demokrasi, stabilitas politik, tata kelola, institusi

Abstract

This study aims to analyze the comparison of democratic quality in Indonesia and Japan by emphasizing the role of political stability and governance. This research employs a qualitative approach using a literature review method based on various academic sources and international institutional reports. The findings reveal that the difference in democratic quality between the two countries does not lie in the existence of democratic institutions, but in their capacity to manage power effectively. Indonesia demonstrates high levels of political participation and electoral competition; however, it has not been able to produce political stability and effective governance, resulting in a predominantly procedural form of democracy. In contrast, Japan exhibits a high level of political stability supported by strong institutions, consistent rule of law, and effective governance, leading to a more substantive democracy. These findings indicate that the quality of democracy is more determined by governance effectiveness and institutional strength rather than the intensity of political competition.

Keywords: democracy, political stability, governance, institution

PENDAHULUAN

Kualitas demokrasi dalam satu dekade terakhir tidak lagi hanya diukur dari keberlangsungan pemilu, tetapi juga dari stabilitas politik dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan dinamika yang cenderung fluktuatif. Berbagai studi menyoroti adanya kecenderungan penurunan kualitas demokrasi, terutama pada aspek kebebasan sipil, independensi lembaga, dan penguatan kekuasaan eksekutif (Febriandy & Wahid, 2024; V-Dem, 2024). Meskipun mekanisme demokrasi tetap berjalan, karakter demokrasi Indonesia masih didominasi oleh aspek prosedural dan belum sepenuhnya mencapai kualitas substantif (Sihombing, 2026). Selain itu, persoalan tata kelola seperti lemahnya penegakan hukum dan fragmentasi politik turut memengaruhi stabilitas sistem politik secara keseluruhan.

Jepang sering diposisikan sebagai contoh demokrasi yang stabil dan terkonsolidasi. Stabilitas politik di Jepang tidak hanya ditopang oleh keberlanjutan institusi, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola dan tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi terhadap pemerintah

(Solís, 2019). Meskipun terdapat dominasi partai politik tertentu dalam jangka panjang, kondisi tersebut tidak secara signifikan melemahkan kualitas demokrasi karena tetap diimbangi oleh mekanisme akuntabilitas dan supremasi hukum yang kuat (Takenaka, 2022). Dengan demikian, Jepang merepresentasikan model demokrasi yang lebih stabil secara institusional, meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi politik.

Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh desain sistem politik, tetapi juga oleh stabilitas politik dan kapasitas tata kelola. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana perbandingan kualitas demokrasi antara Indonesia dan Jepang, bagaimana stabilitas politik memengaruhi kualitas tersebut, serta bagaimana tata kelola pemerintahan berperan dalam membentuknya. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kualitas demokrasi di kedua negara, mengkaji pengaruh stabilitas politik terhadap demokrasi, serta menjelaskan peran tata kelola pemerintahan dalam mendukung atau menghambat kualitas demokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem politik dari Gabriel Almond (1974) yang melihat sistem politik sebagai seperangkat struktur yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Berbeda dari pendekatan yang hanya menekankan bentuk

institusi, Almond menempatkan fungsi sistem politik sebagai penentu utama kinerja politik. Fungsi tersebut mencakup artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, serta implementasi dan penegakan aturan. Dengan demikian, kualitas suatu sistem politik tidak ditentukan oleh apakah ia presidensial atau parlementer, tetapi oleh sejauh mana fungsi-fungsi tersebut bekerja secara efektif dalam menghasilkan output politik.

Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan merupakan hasil langsung dari kinerja fungsi sistem politik. Stabilitas politik muncul ketika sistem mampu mengelola konflik melalui agregasi kepentingan yang efektif, sementara tata kelola yang baik tercermin dari kemampuan sistem dalam memproduksi dan mengimplementasikan kebijakan secara konsisten. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut akan menghasilkan ketidakstabilan dan lemahnya governance. Dengan kata lain, dalam kerangka Almond, persoalan utama dalam demokrasi bukan pada desain formal, melainkan pada kapasitas fungsional sistem politik.

Argumen ini diperkuat oleh berbagai temuan empiris dalam literatur terkini. Laporan dari Varieties of Democracy Institute (2024) menunjukkan bahwa penurunan kualitas demokrasi di Indonesia terutama terjadi pada aspek rule of law dan kontrol terhadap kekuasaan. Dalam perspektif Almond, kondisi ini mencerminkan kegagalan fungsi penegakan aturan dan distribusi kekuasaan dalam sistem politik. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Freedom House (2024) yang mengkategorikan Indonesia sebagai “partly free”, yang secara substantif menunjukkan bahwa kebebasan politik tidak sepenuhnya diikuti oleh akuntabilitas institusional.

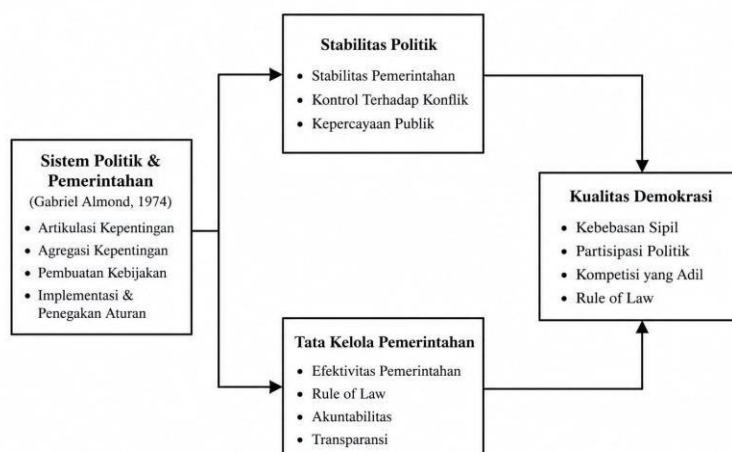
Studi Febriandy dan Wahid (2024) mengidentifikasi adanya democratic backsliding di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya dominasi eksekutif. Dalam kerangka Almond, fenomena ini dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan fungsi dalam sistem politik, di mana fungsi kontrol dan akuntabilitas tidak berjalan optimal. Sementara itu, temuan Sihombing (2026) menunjukkan bahwa partisipasi politik yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. Hal ini menegaskan bahwa fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan belum mampu mengonversi partisipasi menjadi kebijakan yang efektif, sehingga menghasilkan demokrasi yang bersifat prosedural.

Sebaliknya, kasus Jepang menunjukkan pola yang berbeda. Analisis dari Brookings Institution (Solís, 2019) menegaskan bahwa stabilitas politik Jepang tidak hanya berasal dari dominasi partai, tetapi dari kemampuan sistem dalam mengelola konflik secara institusional. Dalam perspektif Almond, hal ini menunjukkan bahwa fungsi agregasi kepentingan berjalan

secara efektif sehingga mampu meminimalkan konflik politik terbuka. Selain itu, studi dari Chatham House (2022) serta Takenaka (2022) menunjukkan bahwa meskipun kompetisi politik relatif terbatas, fungsi akuntabilitas tetap berjalan melalui mekanisme institusional. Dengan demikian, Jepang memperlihatkan bahwa keseimbangan fungsi dalam sistem politik lebih menentukan kualitas demokrasi dibandingkan tingkat kompetisi politik semata.

Data dari International IDEA (2024) juga menunjukkan bahwa Jepang unggul dalam aspek tata kelola, terutama dalam efektivitas kebijakan dan kepercayaan publik terhadap institusi. Dalam kerangka Almond, hal ini mencerminkan keberhasilan fungsi pembuatan dan implementasi kebijakan. Dengan demikian, perbedaan antara Indonesia dan Jepang dapat dijelaskan sebagai perbedaan dalam kapasitas sistem politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara seimbang dan efektif.

Gambar 1. Kerangka Analisis



Sumber: dikelola oleh penulis (2026)

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini berargumen bahwa kualitas demokrasi tidak dapat dipahami hanya dari keberadaan institusi demokrasi, tetapi harus dilihat sebagai hasil dari kinerja sistem politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sistem politik dan pemerintahan sebagai variabel utama, dengan stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan sebagai variabel turunan (output) yang pada akhirnya menentukan kualitas demokrasi. Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam karena tidak hanya membandingkan bentuk sistem, tetapi juga mengevaluasi bagaimana sistem tersebut bekerja dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif sistem politik Gabriel Almond (1974), perbedaan kualitas demokrasi antara Indonesia dan Jepang tidak dapat dijelaskan hanya dari desain institusional (presidensial vs parlementer), tetapi dari bagaimana fungsi-fungsi sistem politik dijalankan. Dengan kata lain, pertanyaan kuncinya bukan “*sistem apa yang digunakan*”, melainkan “*seberapa efektif sistem tersebut mengelola kepentingan, konflik, dan kebijakan*”. Dalam konteks ini, Indonesia dan Jepang menunjukkan dua pola yang kontras, di mana Indonesia kuat pada sisi partisipasi (input), tetapi lemah pada pengolahan dan output, sementara Jepang relatif terbatas pada input, tetapi kuat pada output.

Tabel 1. Identifikasi Persamaan dan Perbedaan

Aspek	Indonesia	Jepang	Analisis
Sistem Politik/Pemerintahan	Presidensial, multi-partai	Parlementer, dominan satu partai	Indonesia menghasilkan kompetisi tinggi tapi fragmentatif; Jepang menghasilkan stabilitas melalui konsolidasi kekuasaan
Agregasi Kepentingan	Lemah (fragmentasi tinggi)	Kuat (terkonsolidasi)	Jepang mampu mereduksi konflik melalui institusi; Indonesia cenderung menghasilkan kompromi pragmatis
Kualitas Demokrasi	Prosedural	Substantif	Indonesia berhenti pada input (pemilu), Jepang unggul pada output (governance)
Stabilitas Politik	Fluktuatif	Tinggi	Stabilitas Indonesia bergantung pada kompromi elit; Jepang pada institusi
Partisipasi Politik	Tinggi	Rendah	Partisipasi politik di Indonesia tidak otomatis meningkatkan kualitas demokrasi
Rule of Law	Lemah	Kuat	Ini variabel kunci yang menjelaskan gap kualitas demokrasi

Tata Kelola (Governance)	Tidak Konsisten	Efektif	Jepang mampu mengonversi stabilitas menjadi kebijakan publik
--------------------------	-----------------	---------	--

Sumber: dikelola oleh penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada kapasitas sistem dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan dan implementasi kebijakan. Indonesia mengalami fragmentasi politik yang tinggi akibat sistem multipartai, sehingga fungsi agregasi tidak berjalan optimal. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali merupakan hasil kompromi jangka pendek, bukan keputusan strategis jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan Varieties of Democracy Institute (2024) yang menunjukkan penurunan kualitas demokrasi Indonesia pada aspek rule of law dan kontrol kekuasaan, yang dalam kerangka Almond mencerminkan kegagalan fungsi penegakan aturan.

Sebaliknya, Jepang menunjukkan bahwa stabilitas politik bukan sekadar hasil dominasi partai, tetapi hasil dari fungsi agregasi kepentingan yang efektif. Analisis dari Brookings Institution (Solís, 2019) menegaskan bahwa konflik politik di Jepang dapat dikelola dalam kerangka institusional, sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem. Dengan demikian, Jepang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih konsisten dan tata kelola yang lebih efektif, yang diperkuat oleh data International IDEA (2024).

Perbedaan kinerja sistem politik antara Indonesia dan Jepang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi beberapa faktor struktural:

- Faktor Politik

Secara politik, Indonesia ditandai oleh sistem multipartai yang menghasilkan fragmentasi tinggi. Dalam perspektif Almond, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi agregasi kepentingan tidak berjalan efektif karena terlalu banyak aktor yang harus diakomodasi. Akibatnya, stabilitas politik menjadi bergantung pada kompromi elite, bukan pada institusi. Sebaliknya, Jepang memiliki struktur partai yang lebih terkonsolidasi, sehingga fungsi agregasi dapat berjalan lebih efisien tanpa mengorbankan stabilitas (Takenaka, 2022). Ini menunjukkan bahwa jumlah aktor politik memengaruhi efektivitas fungsi sistem.

- Faktor Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Jepang memiliki tingkat stabilitas ekonomi yang lebih tinggi, yang memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan secara konsisten. Dalam kerangka Almond, kondisi ini memperkuat fungsi implementasi kebijakan karena tidak terganggu oleh

tekanan ekonomi yang besar. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi di Indonesia memperbesar potensi konflik kepentingan, sehingga memperberat fungsi agregasi dan memperlemah stabilitas politik. Artinya, kapasitas ekonomi berkontribusi langsung pada efektivitas output sistem politik.

- Faktor Budaya Politik

Budaya politik Indonesia cenderung bersifat partisipatif namun belum sepenuhnya rasional, yang tercermin dari tingginya mobilisasi berbasis identitas. Dalam perspektif Almond, hal ini menunjukkan bahwa fungsi artikulasi kepentingan belum menghasilkan agregasi yang berkualitas. Sebaliknya, Jepang memiliki budaya politik yang lebih institusional dan stabil, sehingga konflik dapat dikelola tanpa eskalasi (Solís, 2020). Dengan demikian, budaya politik memengaruhi kualitas input dalam sistem politik.

- Faktor Sejarah

Secara historis, Jepang telah mengalami proses konsolidasi demokrasi yang lebih panjang sejak pasca Perang Dunia II, sehingga institusinya lebih matang. Indonesia, yang relatif baru dalam fase demokrasi pasca reformasi, masih dalam proses adaptasi institusional. Dalam kerangka Almond, hal ini menjelaskan mengapa fungsi sistem politik di Indonesia belum berjalan optimal. Artinya, kedewasaan institusi sangat ditentukan oleh pengalaman historisnya.

Dari keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa perbedaan kualitas demokrasi antara Indonesia dan Jepang bukan disebabkan oleh perbedaan sistem (presidensial vs parlementer), melainkan oleh perbedaan kapasitas sistem dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Indonesia menunjukkan kekuatan pada sisi input, tetapi gagal mengonversinya menjadi output yang efektif. Sebaliknya, Jepang menunjukkan bahwa stabilitas dan tata kelola yang baik dapat dicapai melalui fungsi sistem yang berjalan secara seimbang.

Analisis ini menegaskan bahwa dalam perspektif Almond, kualitas demokrasi merupakan hasil dari kinerja sistem politik secara keseluruhan, bukan sekadar hasil dari desain institusional. Ini sekaligus menjelaskan mengapa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, sementara Jepang telah mencapai bentuk yang lebih substantif.

Refleksi terhadap Indonesia

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Indonesia

Aspek	Kelebihan	Kekurangan/Tantangan
-------	-----------	----------------------

Partisipasi Politik (Input)	Tinggi dan inklusif (pemilu langsung, keterlibatan publik luas)	Cenderung dangkal, rentan mobilisasi dan politik identitas
Sistem Politik	Kompetitif, membuka ruang representasi beragam	Fragmentasi tinggi, koalisis pragmatis melemahkan efektivitasnya
Legitimasi Demokrasi	Tinggi karena berbasis pemilu langsung	Legitimasi tidak selalu diikuti kinerja pemerintahan
Stabilitas Politik (Output)	Relatif terjaga secara formal	Bergantung pada kompromi elit, bukan institusi
Artikulasi Kepentingan	Banyak saluran representasi (partai, kelompok kepentingan)	Terfragmentasi, sulit dikonsolidasikan menjadi kebijakan
Agregasi Kepentingan	Mengakomodasi keberagaman sosial-politik	Lemah, menghasilkan kompromi pragmatis dan jangka pendek
Rule of Law	Secara formal sudah ada kerangka hukum kuat	Implementasi lemah, inkonsisten, rentan intervensi kekuasaan
Tata Kelola (Governance)	Ada upaya reformasi birokrasi	Efektivitas rendah, kebijakan sering tidak konsisten

Sumber: dikelola oleh penulis (2026)

Dalam perspektif sistem politik Gabriel Almond (1974), kelebihan utama Indonesia terletak pada kuatnya dimensi input sistem politik, khususnya dalam partisipasi dan artikulasi kepentingan. Tingginya partisipasi politik menunjukkan bahwa sistem mampu menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Namun, keunggulan ini tidak otomatis menghasilkan kualitas demokrasi yang tinggi karena fungsi agregasi kepentingan tidak berjalan efektif. Fragmentasi partai dan banyaknya aktor politik menyebabkan kepentingan yang masuk ke sistem tidak terintegrasi menjadi kebijakan yang koheren, melainkan berhenti pada kompromi elite yang bersifat jangka pendek.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa demokrasi Indonesia cenderung bersifat prosedural. Laporan dari Varieties of Democracy Institute (2024) menunjukkan adanya

penurunan pada aspek rule of law dan kontrol terhadap kekuasaan, yang dalam kerangka Almond mencerminkan kegagalan fungsi penegakan aturan. Hal ini juga diperkuat oleh Freedom House (2024) yang mengkategorikan Indonesia sebagai “partly free”, menandakan bahwa kebebasan politik tidak diikuti oleh akuntabilitas yang memadai.

Persoalan utama Indonesia terletak pada ketidakseimbangan antara input dan output sistem politik. Sistem mampu menyerap aspirasi dalam jumlah besar, tetapi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengolahnya menjadi kebijakan yang efektif. Akibatnya, stabilitas politik yang terbentuk cenderung bersifat semu karena bergantung pada negosiasi elite, bukan pada kekuatan institusi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik karena output yang dihasilkan tidak sebanding dengan ekspektasi masyarakat.

Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lebih ditentukan oleh keseimbangan fungsi dalam sistem politik, bukan oleh tingginya partisipasi semata. Analisis dari Brookings Institution (Solís, 2019) menunjukkan bahwa stabilitas politik Jepang berasal dari kemampuan sistem dalam mengelola konflik secara institusional. Dalam kerangka Almond, hal ini mencerminkan keberhasilan fungsi agregasi kepentingan yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan tanpa menghasilkan fragmentasi.

Selain itu, Jepang memperlihatkan bahwa efektivitas tata kelola merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Data dari International IDEA (2024) menunjukkan bahwa Jepang unggul dalam aspek governance, terutama dalam konsistensi kebijakan dan kepercayaan publik. Hal ini menegaskan bahwa fungsi implementasi kebijakan yang kuat dapat meningkatkan legitimasi sistem politik secara keseluruhan.

Pelajaran utama bagi Indonesia bukanlah meniru sistem parlementer Jepang, melainkan memperkuat kapasitas fungsional sistem politik. Artinya, reformasi harus diarahkan pada penguatan fungsi agregasi kepentingan, penegakan rule of law, serta peningkatan efektivitas tata kelola. Tanpa perbaikan pada aspek tersebut, demokrasi Indonesia akan tetap terjebak dalam kondisi di mana partisipasi tinggi tidak menghasilkan kualitas kebijakan yang setara. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan pada membangun demokrasi, tetapi pada menyeimbangkan fungsi input dan output dalam sistem politik agar demokrasi dapat bekerja secara efektif.

KESIMPULAN

Analisis perbandingan antara Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa perbedaan

kualitas demokrasi tidak terutama ditentukan oleh jenis sistem pemerintahan, melainkan oleh kapasitas sistem politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Dalam perspektif Gabriel Almond (1974), Indonesia memiliki kekuatan pada sisi input, terutama dalam partisipasi dan artikulasi kepentingan yang tinggi. Namun, keunggulan tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan agregasi kepentingan, penegakan aturan, dan implementasi kebijakan yang memadai. Akibatnya, sistem politik Indonesia cenderung menghasilkan stabilitas yang bersifat semu serta tata kelola yang tidak konsisten, sehingga kualitas demokrasi tetap berada pada level prosedural.

Sebaliknya, Jepang menunjukkan bahwa kualitas demokrasi yang lebih tinggi dapat dicapai melalui keseimbangan antara fungsi input dan output sistem politik. Meskipun tingkat partisipasi politik relatif lebih rendah, sistem politik Jepang mampu menjalankan fungsi agregasi kepentingan dan implementasi kebijakan secara efektif, sehingga menghasilkan stabilitas politik yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang konsisten. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya bergantung pada intensitas kompetisi politik, tetapi pada kemampuan sistem dalam mengelola konflik dan menghasilkan kebijakan yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Kontribusi utama analisis ini terletak pada penegasan bahwa pendekatan sistem politik ala Almond memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam memahami kualitas demokrasi. Dengan menempatkan stabilitas politik dan tata kelola sebagai output dari kinerja sistem, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia bukan pada desain institusional, melainkan pada ketidakseimbangan fungsi dalam sistem politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas demokrasi perlu difokuskan pada penguatan fungsi agregasi kepentingan, penegakan rule of law, serta efektivitas implementasi kebijakan agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan kinerja pemerintahan yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A. (1974). *Comparative politics today: A world view*. Boston: Little, Brown and Company.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks demokrasi Indonesia 2023-2024*.
- Febriandy, I., & Wahid, A. (2024). *Kemunduran demokrasi di Indonesia: Analisis laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024*. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset*

- Sosial-Humaniora, 7(2), 1041-1050. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.12392>
- Freedom House. (2024a). Freedom in the world 2024: Indonesia.
- Freedom House. (2024b). Freedom in the world 2024: Japan. Retrieved from <https://freedomhouse.org/country/japan/freedom-world/2024>
- Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). (2024). Democracy tracker: Japan. Muto, K. (2024). Authoritarianism vs democracy: Comparative perspectives in Japan.
- Rasyid, M., et al. (2024). A meta-analysis on democracies in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 9(1) 58-77. <https://doi.org/10.24905/jip.9.1.2024.58-77>
- Rasyid, M., et al. (2025). Global research publication on democracy in Indonesia: A bibliometric analysis. *Natapraja Journal*, 13(1), 87-109. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v13i1.84454>
- Sihombing, H. (2026). The dynamics of Indonesian democracy (2021-2024): A nonparametric comparative analysis of democracy indices and their aspects. *HASINA: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 54-60. <https://doi.org/10.35897/hasina.v3i1.2356>
- Solís, M. (2019). Japan's consolidated democracy in an era of populist turbulence. Brookings Institution. Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/japans-consolidated-democracy>
- Solís, M. (2020). Japan's democratic renewal and the survival of the liberal order. Brookings Institution. Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/japans-democratic-renewal>
- Suryadi, A., & Nelwati. (2024). Mengupas Sistem Demokrasi Indonesia, Keunikan dan Perbandingan Global. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i3.2823>
- Takenaka, H. (2022). Japan's democracy: Lessons and reflections. JCIE. Retrieved from <https://jcie.org/analysis/books-reports/japans-democracy>
- Varieties of Democracy Institute. (2024). Democracy report 2024. Retrieved from <https://www.v-dem.net>
- Chatham House. (2022). Democracy in Japan. Retrieved from <https://www.chathamhouse.org/2022/02/japan-democracy>